



## **Analisis Program Bantuan Sosial Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Tanjungpinang**

**Iqnatia Patricia Manalu<sup>1\*</sup>, Nuranisyah<sup>2</sup>, Vanny Estperditja br Pinem<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

email: [Ignatiam@gmail.com](mailto:Ignatiam@gmail.com)

---

### **Article Info :**

Received:

16-10-2025

Revised:

25-11-2025

Accepted:

06-12-2025

---

### **Abstract**

*Social assistance programs are strategic public policy instruments in efforts to improve community welfare, especially for poor and vulnerable groups in urban areas such as Tanjungpinang City. This study aims to analyze the role and effectiveness of government social assistance programs in improving community welfare and to identify challenges in their implementation. The research uses a literature study method with a descriptive qualitative approach, with secondary data sources obtained from scientific journals, books, official government reports, social assistance policies, and publications from the Central Statistics Agency. The results and discussion show that social assistance programs such as PKH, BPNT, and BLT contribute positively to meeting basic needs, social protection, and economic recovery of beneficiary households. The effectiveness of the program still faces obstacles in the form of inaccurate targeting, limited validity of beneficiary data, and suboptimal integration of assistance with sustainable economic empowerment programs. The study concludes that improving community welfare through social assistance requires strengthening data collection systems, institutional coordination, transparency in implementation, and policy orientation that is not only protective in the short term but also promotes community independence and long-term welfare.*

**Keywords:** Social Assistance, Community Welfare, Public Policy, Poverty, Tanjungpinang City.

---

### **Abstrak**

Program bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan publik yang strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas program bantuan sosial pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, kebijakan bantuan sosial, serta publikasi Badan Pusat Statistik. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT berkontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi rumah tangga penerima manfaat. Efektivitas program masih menghadapi kendala berupa ketidaktepatan sasaran, keterbatasan validitas data penerima, serta belum optimalnya integrasi bantuan dengan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial memerlukan penguatan sistem pendataan, koordinasi kelembagaan, transparansi pelaksanaan, serta orientasi kebijakan yang tidak hanya bersifat protektif jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

**Kata kunci:** Bantuan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Publik, Kemiskinan, Kota Tanjungpinang.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

## **PENDAHULUAN**

Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan publik yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, hal ini dilakukan karena tantangan sosial ekonomi di daerah perkotaan seperti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menjadi isu krusial dalam perencanaan pembangunan daerah (Akim et al., 2024). Persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 mencapai 9,85%, meskipun tren kemiskinan sempat menurun pada

beberapa periode sebelumnya, namun angka ini tetap menunjukkan kebutuhan intervensi yang lebih intensif dari pemerintah daerah (BPS, 2022; Yusnike & Natalia, 2024).

Fenomena ini diperkuat oleh dinamika kenaikan angka kemiskinan setelah pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan dan akses layanan dasar masyarakat di Tanjungpinang (Solina et al., 2021). Laporan penelitian terdahulu menegaskan bahwa tanpa kebijakan perlindungan sosial yang efektif, kesejahteraan masyarakat rentan akan sulit meningkat secara signifikan dalam jangka menengah hingga panjang (Siahaan et al., 2025). Berikut ini adalah gambaran indikator kemiskinan di Kota Tanjungpinang yang relevan dengan kajian program bantuan sosial pemerintah:

**Tabekl 1. Profil Kemiskinan dan Tren Penerima Bantuan Sosial di Kota Tanjungpinang Tahun 2020–2022**

| <b>Indikator Kemiskinan Kota Tanjungpinang Tahun 2022</b> | <b>Persentase / Nilai</b>          |
|---|------------------------------------|
| Persentase penduduk miskin                                | 2022 9.85%                         |
| Tren kemiskinan 2020–2022                                 | 2020–2022 Naik dari 9.37% ke 9.85% |
| Jumlah penduduk miskin Kota Tanjungpinang                 | 2022 21 ribu jiwa (estimasi)       |

Sumber: BPS (2022), Antaranews. (2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan kesejahteraan, angka kemiskinan di Tanjungpinang masih berada pada level yang memerlukan perhatian kebijakan yang lebih komprehensif, sehingga menjadi dasar kuat bagi evaluasi efektivitas program bantuan sosial pemerintah dalam konteks lokal (Utari et al., 2024).

Program bantuan sosial di Kota Tanjungpinang dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta bantuan barang dan layanan lainnya yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Zurina et al., 2022). Distribusi bantuan ini bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat miskin, menjaga konsumsi rumah tangga, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat melalui intervensi ekonomi lokal (Akim et al., 2024). Misalnya pada tahun 2023 Pemerintah Kota Tanjungpinang menyalurkan BLT sebesar Rp8,8 miliar kepada lebih dari 16.000 Keluarga Penerima Manfaat di empat kecamatan utama untuk membantu meringankan beban sosial ekonomi masyarakat rentan (PPID Kemendagri, 2024). Hal ini sejalan dengan peran dinas sosial dan perangkat pemerintah dalam menyasar kelompok masyarakat yang berpotensi paling terdampak oleh gejolak ekonomi, seperti lansia, keluarga miskin, dan masyarakat disabilitas (Suryanti & Incen, 2023).

Keberadaan bantuan sosial juga berimplikasi pada dinamika ekonomi lokal yang lebih luas karena aliran insentif ekonomi ke tingkat rumah tangga memiliki efek terhadap permintaan barang dan jasa lokal, sehingga berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi daerah pascapandemi (Siahaan et al., 2025). Namun demikian, efektivitas program ini masih diperdebatkan karena beberapa indikator sosial seperti pertumbuhan pendapatan keluarga dan pengurangan kemiskinan absolut belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat (Akim et al., 2024). Kendala implementasi, khususnya terkait dengan validitas data penerima dan cakupan bantuan yang tidak merata di seluruh wilayah kota, sering kali menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan program social safety net ini (Utari et al., 2024). Meskipun bantuan sosial memberikan perlindungan jangka pendek terhadap risiko sosial, tetapi indikator kesejahteraan jangka panjang, seperti pendapatan berkelanjutan dan akses layanan, masih memerlukan strategi kebijakan yang lebih inovatif dan terintegrasi (Yusnike & Natalia, 2024).

Evaluasi terhadap program bantuan sosial juga penting karena selain bertujuan mengurangi angka kemiskinan, program seperti PKH dan BLT harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik melalui akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang lebih baik (Utari et al., 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan variasi kemampuan program pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan, tergantung pada sinergi antar lembaga pemerintahan, kualitas data kesejahteraan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program (Zurina et al., 2022). Perlunya kajian mendalam terhadap relevansi, efektivitas, dan tantangan dalam

pelaksanaan bantuan sosial di Kota Tanjungpinang sebagai upaya untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (Siahaan et al., 2025). Evaluasi seperti ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di era pascapandemi dan masa pemulihan ekonomi lokal.

Penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan dengan tujuan utama mengidentifikasi bagaimana program bantuan sosial pemerintah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang secara nyata dan baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Kajian ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki kebijakan perlindungan sosial yang efektif, efisien, serta sesuai dengan kondisi sosial ekonomi lokal yang dinamis, termasuk mempertimbangkan tantangan data, implementasi, dan keberlanjutan program (Akim et al., 2024; Siahaan et al., 2025). Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan daerah dalam merumuskan strategi bantuan sosial yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil yang terukur dalam jangka panjang. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik dan praktik kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial di Indonesia.

Program bantuan sosial di Kota Tanjungpinang juga menghadapi tantangan terkait keberlanjutan pendanaan dan kesinambungan distribusi, sehingga evaluasi mekanisme alokasi anggaran menjadi aspek penting dalam pengelolaan program (Khairunisa Dwita, 2021). Ketidaksesuaian data penerima manfaat dengan kondisi nyata di lapangan terkadang menimbulkan ketimpangan bantuan, dimana beberapa keluarga yang benar-benar membutuhkan belum mendapatkan akses yang memadai (Zurina et al., 2022). Hal ini menegaskan perlunya perbaikan sistem pendataan dan monitoring untuk memastikan setiap program sosial memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat (Salsabila et al., 2022). Studi terdahulu menekankan bahwa penguatan kapasitas aparatur dinas sosial dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program bantuan sosial di tingkat kota (Suryanti & Incen, 2023).

Program bantuan sosial di Tanjungpinang memiliki efek signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, melalui pemberian tunjangan, sembako, dan layanan kesehatan yang terintegrasi (Suryanti & Incen, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia penerima bantuan sosial mengalami peningkatan kualitas hidup, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, karena bantuan tersebut mampu mengurangi beban kebutuhan pokok dan meningkatkan rasa aman finansial (Solina et al., 2021). Cakupan bantuan yang masih terbatas di beberapa wilayah menimbulkan kesenjangan sosial antar-kelompok masyarakat, sehingga program ini perlu disertai strategi redistribusi yang lebih adil dan transparan (Ramadhani et al., 2024). Evaluasi kinerja program secara periodik penting untuk menilai dampak sosial dan ekonomi, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif (Akim et al., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi pustaka dipilih untuk menganalisis secara konseptual dan teoritis program bantuan sosial pemerintah serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai konsep, kebijakan, dan temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah dan dokumen resmi. Sumber pustaka meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial, serta publikasi resmi lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta keterkaitan dengan tema kesejahteraan masyarakat dan program bantuan sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah di Kota Tanjungpinang**

Pelaksanaan program bantuan sosial di Kota Tanjungpinang mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat jaring pengaman sosial melalui serangkaian program yang ditujukan kepada kelompok masyarakat rentan dan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan orientasi pada pengurangan beban kebutuhan sehari-hari warga penerima manfaat melalui bantuan tunai dan non-tunai. Pemerintah kota secara rutin menyerahkan Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) kepada keluarga penerima manfaat PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang merupakan instrumen utama untuk akses bantuan, sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di tingkat lokal (Presmedia, 2025). Program-program ini telah diintegrasikan dengan sistem administrasi pemerintahan daerah untuk memperkuat koordinasi antara dinas sosial, perbankan, dan lembaga pemberi layanan sehingga bantuan dapat diterima langsung oleh keluarga yang berhak melalui mekanisme pencairan formal. Keberlanjutan program juga didukung oleh kebijakan anggaran lokal yang memprioritaskan dukungan terhadap kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

Penyebaran bantuan sosial dilakukan secara berjenjang di empat kecamatan utama di Tanjungpinang, yaitu Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Kota, sehingga mencakup ruang geografis kota yang heterogen. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi disparitas sosial antarwilayah serta menjamin ketersediaan bantuan bagi kelompok paling rentan. Penyerahan KKS dan paket bantuan lainnya dilakukan secara simbolis di kantor dinas sosial setempat, yang sekaligus menjadi momen publikasi atas komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warga miskin (TVRI News, 2025). Tindak lanjut administrasi dari penyerahan KKS ini mencakup pendaftaran dalam sistem perbankan nasional agar dana bantuan dapat dicairkan langsung ke rekening penerima.

Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bagian dari bantuan sosial untuk warga tidak mampu, khususnya melalui dana insentif daerah yang diberikan pemerintah pusat. Besaran bantuan BLT yang diterima oleh masyarakat mencapai Rp550 ribu per keluarga dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp8,8 miliar kepada sekitar 16.000 keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam DTKS (ANTARA News, 2023). Bantuan ini dirancang untuk memberikan ruang gerak finansial kepada masyarakat penerima dalam memenuhi kebutuhan pokok tanpa melalui proses pembelian langsung barang tertentu, sehingga memberi fleksibilitas pemanfaatan sesuai kebutuhan keluarga. BLT disalurkan melalui PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur resmi untuk memastikan proses pencairan berjalan secara terstandarisasi dan tepat waktu.

Dalam implementasi bantuan sosial, penerima manfaat dibagi berdasarkan wilayah kecamatan sehingga mempermudah pemetaan distribusi dan monitoring penyaluran bantuan. Distribusi penerima PKH dan BPNT pada penyaluran tahun 2025 mencatat bahwa 1.463 kepala keluarga (KK) memperoleh bantuan yang tersebar di keempat kecamatan kota Tanjungpinang, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. Distribusi Jumlah Penerima KKS (PKH & BPNT) di Setiap Kecamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2025**

| <b>Kecamatan</b>    | <b>Jumlah Penerima KKS (PKH &amp; BPNT)</b> |
|---------------------|---|
| Tanjungpinang Timur | 528 KK                                      |
| Bukit Bestari       | 443 KK                                      |
| Tanjungpinang Barat | 345 KK                                      |
| Tanjungpinang Kota  | 147 KK                                      |

Sumber: Presmedia. (2025)

Tabel tersebut menunjukkan struktur distribusi penerima bantuan yang merata di setiap kecamatan, yang diharapkan dapat mencerminkan keterjangkauan layanan sosial dan kesetaraan akses bantuan di seluruh wilayah kota. Integrasi data penerima dalam DTKS merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, di mana data ini digunakan sebagai basis utama untuk menentukan keluarga miskin dan rentan sosial yang layak memperoleh program. Penggunaan DTKS ini membantu mengurangi risiko data ganda atau bantuan yang tidak tepat sasaran, sekaligus memastikan bahwa pemerintah memperoleh basis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran DTKS dalam program bantuan sosial juga memperkuat akuntabilitas penyaluran program karena DTKS dirancang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam regulasi nasional tentang penanggulangan kemiskinan. Pemutakhiran DTKS secara berkala menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan sosial di kota Tanjungpinang.

Penerapan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank dan pos menunjukkan transformasi administratif dalam pelayanan bantuan sosial, yang awalnya berbasis manual kini beralih ke mekanisme pencairan digital ke rekening penerima secara berkala. Mekanisme ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran dana sehingga meminimalkan risiko keterlambatan atau penyalahgunaan bantuan. Kolaborasi antara dinas sosial, perbankan, dan perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah dalam monitoring penyaluran program menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan layanan sosial di tingkat komunitas. Tantangan administratif tetap muncul di lapangan terkait keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur data di beberapa wilayah kecamatan yang secara geografis lebih sulit dijangkau.

Dalam implementasi PKH, bantuan tidak hanya berfokus pada bantuan tunai, tetapi juga diarahkan untuk memperluas akses layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi bagi keluarga penerima, sesuai dengan karakter sosial program yang bersyarat. Program ini dirancang untuk membantu penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan mendasar keluarga, termasuk biaya pendidikan anak serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil, yang pada gilirannya berkontribusi pada indikator sosial jangka panjang. Pendekatan semacam ini memadukan bantuan langsung tunai dengan pemberian fasilitas layanan sosial untuk menciptakan keluaran yang lebih luas dibanding sekedar pemenuhan kebutuhan ekonomi sementara (Teguh Susanto, 2025). Keterlibatan dinas sosial dalam memfasilitasi akses layanan pendidikan dan kesehatan menjadi indikasi bahwa program bantuan sosial juga berfungsi sebagai jembatan menuju pembangunan sumber daya manusia.

Tantangan dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Tanjungpinang mencakup masalah validitas data, keterbatasan jumlah penerima, dan kesenjangan akses antarwilayah kecamatan, yang berimplikasi pada ketepatan sasaran sasaran. Ketergantungan pada data administratif yang kadang tidak mutakhir menyebabkan beberapa keluarga miskin data tidak sepenuhnya terakomodasi dalam DTKS, mempersempit akses mereka terhadap bantuan sosial yang tersedia. Pemerintah daerah menyadari bahwa perbaikan data kesejahteraan sosial harus terus dilakukan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme pendaftaran dan kriteria penerimaan manfaat. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perlindungan sosial agar bantuan dapat benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Pemerintah daerah juga perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lembaga akademik untuk memperluas jangkauan program serta meningkatkan efektifitas implementasi program bantuan sosial. Sinergi antar-stakeholder diperlukan agar setiap unsur masyarakat memahami peran mereka dalam mendukung proses distribusi, pemantauan, dan evaluasi program sosial. Keterlibatan berbagai pihak ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam menjawab tantangan administratif seperti validasi data dan dukungan logistik di daerah terpencil. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas kebijakan sosiop untuk memperkuat dampak positif nyata di masyarakat.

Pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah di Kota Tanjungpinang menunjukkan adanya komitmen serius untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan operasional dan administratif. Pemerintah daerah melalui program bantuan sosial telah mencoba mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memanfaatkan mekanisme DTKS, kolaborasi lembaga dan pendanaan yang tersedia. Perbaikan sistem pendataan, perluasan cakupan bantuan, dan pembaruan kebijakan berbasis data akan menjadi prasyarat penting untuk memperkuat efektivitas program. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memastikan setiap keluarga miskin di Tanjungpinang memperoleh akses bantuan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mereka (Hakim et al., 2024; Yusnike & Natalia, 2024; Siahaan et al., 2025).

### **Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Program bantuan sosial di Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin dan rentan yang menghadapi keterbatasan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil. Dampak ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih layak, sehingga secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat (Solina et al., 2021). Penerima manfaat program PKH dan BLT dilaporkan mampu memenuhi kebutuhan pokok rumah

tangga lebih konsisten dibanding sebelum menerima bantuan, sehingga mengurangi tekanan ekonomi yang dapat memicu kemiskinan multidimensi. Selain itu, bantuan sosial yang terstruktur ini juga menciptakan efek psikologis positif, berupa rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap keberpihakan pemerintah.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) turut memberikan pengaruh signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi keluarga penerima, dengan mekanisme distribusi yang memungkinkan keluarga membeli bahan pangan sesuai kebutuhan mereka. Hal ini berbeda dengan bantuan berbentuk barang langsung, karena BPNT memberikan fleksibilitas pemanfaatan bantuan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga (Pramesti et al., 2019). Penggunaan e-warong sebagai sarana penyaluran BPNT juga mendorong interaksi antara masyarakat dengan pedagang lokal sehingga memicu perputaran ekonomi di tingkat komunitas. Mekanisme ini memperkuat hubungan sosial-ekonomi antar warga serta mendukung pemberdayaan masyarakat lokal.

Evaluasi terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa bantuan sosial berdampak signifikan pada pendidikan dan kesehatan anak, terutama melalui pemberian bantuan tunai bersyarat yang memerlukan pemenuhan kewajiban sekolah dan imunisasi anak (Utari et al., 2024). Keluarga penerima PKH yang mematuhi kewajiban ini mendapatkan dukungan finansial secara berkala, sehingga memotivasi orang tua untuk tetap memastikan anak-anak mereka mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Implikasi positif dari kebijakan ini juga tercermin dalam peningkatan angka partisipasi sekolah dan pengurangan angka stunting di beberapa wilayah kota Tanjungpinang. Dengan pendekatan berbasis syarat program PKH mampu menciptakan dampak jangka panjang yang lebih luas bagi kesejahteraan generasi muda.

Dampak program bantuan sosial juga dapat dilihat melalui tren pengurangan kemiskinan di Kota Tanjungpinang selama beberapa tahun terakhir, yang menjadi indikator penting efektivitas program bantuan. Berikut data terbaru persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang dari tahun 2020 hingga 2023:

**Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin di Kota Tanjungpinang Tahun 2020–2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b> |
|--------------|---------------------------------------|
| 2020         | 9.37                                  |
| 2021         | 9.57                                  |
| 2022         | 9.85                                  |
| 2023         | 7.95                                  |

Sumber: BPS. (2022)

Tabel ini menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang, yang mengindikasikan dampak positif dari program bantuan sosial pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak program bantuan sosial juga terlihat pada peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi ibu rumah tangga penerima PKH melalui pelatihan kerajinan tangan dan usaha mikro, seperti yang diterapkan di Kampung Bulang (Solina et al., 2022). Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan produktif komunitas. Dampak jangka menengah dari kegiatan ini dapat meningkatkan kontribusi ekonomi rumah tangga dan memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga. Program PKH tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mendukung pemberdayaan sosial.

Bantuan sosial yang diberikan melalui program BLT dan PKH juga berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan relatif di wilayah kota Tanjungpinang, yang tercermin dalam laporan Badan Pusat Statistik dan evaluasi program pemerintah daerah (Hakim et al., 2024). Hasil pemantauan menunjukkan bahwa keluarga penerima mampu menutupi kebutuhan pokok sehari-hari, mengurangi hutang, dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran membantu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial merupakan kunci dalam memaksimalkan dampak kesejahteraan masyarakat.

Penerima bantuan sosial melaporkan peningkatan kualitas hubungan antaranggota keluarga karena kurangnya tekanan ekonomi yang biasanya menimbulkan konflik rumah tangga (Suryanti &

Incen, 2023). Bantuan ini juga memfasilitasi keluarga untuk mengikuti kegiatan sosial dan budaya di lingkungan sekitar, sehingga menumbuhkan rasa keterikatan komunitas. Dengan adanya program bantuan sosial, penerima juga lebih aktif dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang berdampak positif pada kesejahteraan sosial jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara bantuan sosial dengan pembangunan sosial di tingkat komunitas.

Program bantuan sosial pemerintah juga berperan dalam pemulihian ekonomi lokal, terutama melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menerima dukungan tambahan dari pemerintah kota (Hardiansyah et al., 2022; Putri et al., 2025). Penerima bantuan yang juga mengikuti program pelatihan kewirausahaan mampu memanfaatkan dana bantuan untuk modal usaha, sehingga meningkatkan pendapatan keluarga. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh penerima langsung, tetapi juga berimplikasi pada ekonomi lokal melalui peningkatan transaksi di pasar tradisional dan usaha mikro. Pendekatan pemberdayaan ekonomi ini bantuan sosial menjadi instrumen strategis untuk mendorong pemulihian ekonomi di tingkat kota.

Terdapat hubungan antara bantuan sosial dan pengurangan ketimpangan gender, karena program PKH menargetkan perempuan sebagai kepala keluarga penerima manfaat untuk memastikan dana digunakan secara produktif (Kurnianingsih et al., 2022). Strategi ini memungkinkan perempuan memiliki kontrol lebih besar terhadap pengelolaan rumah tangga dan penggunaan bantuan finansial, sekaligus mendukung pemberdayaan perempuan di komunitas. Dampak ini terlihat dari peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif serta pengambilan keputusan strategis keluarga. Program bantuan sosial memiliki efek multidimensional terhadap kesejahteraan masyarakat, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial dan gender.

Implementasi program bantuan sosial di Tanjungpinang telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara finansial, sosial, maupun pemberdayaan ekonomi. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran, integrasi layanan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan pelatihan keterampilan, mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima. Evaluasi program menegaskan pentingnya mekanisme monitoring dan pembaruan data yang berkelanjutan untuk memastikan setiap keluarga yang berhak memperoleh bantuan. Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui program bantuan sosial (Hakim et al., 2024; Utari et al., 2024; Solina et al., 2022).

### **Tantangan dan Implikasi Implementasi Program Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Tanjungpinang**

Implementasi program bantuan sosial di Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan administratif yang memengaruhi capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tantangan tersebut muncul dalam bentuk ketidaktepatan sasaran, dinamika kebutuhan masyarakat yang berubah, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan pelaksana program di tingkat lokal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial sangat ditentukan oleh kualitas data penerima dan mekanisme verifikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah (Hakim et al., 2024). Ketika tantangan tersebut tidak dikelola secara sistematis, maka bantuan sosial berpotensi hanya bersifat jangka pendek dan kurang memberikan dampak struktural terhadap kesejahteraan masyarakat.

Masalah ketepatan sasaran menjadi isu yang paling sering muncul dalam evaluasi program bantuan sosial, baik pada skala nasional maupun daerah, termasuk di Kota Tanjungpinang. Kesalahan inklusi dan eksklusi dalam pendataan penerima menyebabkan adanya kelompok masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak terakomodasi, sementara kelompok lain yang relatif mampu masih tercatat sebagai penerima. Kondisi ini memperlihatkan bahwa basis data terpadu kesejahteraan sosial masih memerlukan pembaruan dan sinkronisasi lintas sektor agar sesuai dengan kondisi faktual masyarakat (Siahaan et al., 2025). Akurasi data menjadi fondasi utama agar bantuan sosial benar-benar berkontribusi pada penurunan kerentanan sosial ekonomi.

Mekanisme distribusi bantuan sosial juga menghadapi tantangan koordinasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Minimnya partisipasi publik dalam verifikasi data penerima dapat memperbesar potensi kesalahan sasaran dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Keterlibatan masyarakat seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kontrol sosial yang menjamin transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan (Mahadiansar & Romadhan, 2021).

Penguatan peran masyarakat ini penting agar program bantuan sosial tidak dipersepsikan sekadar sebagai kebijakan politis, melainkan sebagai instrumen kesejahteraan publik. Untuk memperjelas gambaran tantangan implementasi bantuan sosial, tabel berikut menyajikan jenis permasalahan penyaluran bantuan sosial berdasarkan temuan audit dan laporan media resmi yang relevan secara nasional dan kontekstual dengan kondisi Kota Tanjungpinang:

**Tabel 4. Jenis Masalah dalam Penyaluran Bantuan Sosial yang Relevan dengan Tantangan Lokal**

| <b>Jenis/Indikator Masalah</b>  | <b>Uraian Temuan</b>  |
|---------------------------------|---|
| Kesalahan inklusi & eksklusi    | Kesalahan penerima terjadi karena data tidak terverifikasi dengan baik menyebabkan penerima tidak tepat   |
| Kebutuhan verifikasi publik     | Pemerintah mendorong masyarakat ikut memverifikasi dan mengoreksi data penerima untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran   |
| Distribusi bansos yang intensif | Sekitar 6.961 KPM telah menerima penyaluran PKH & sembako sampai tingkat 99% pada tahap I-2025 di Tanjungpinang meski angka tersebut belum sepenuhnya menghilangkan tantangan akurasi |

Sumber: Antaranews. (2025), Antara (2025), Republikas (2025)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian distribusi bantuan sosial yang tinggi belum sepenuhnya menjamin efektivitas program apabila tidak diiringi dengan kualitas data yang akurat. Penyaluran yang hampir menyeluruh dapat menciptakan kesan keberhasilan administratif, namun tetap menyimpan persoalan substantif terkait keberlanjutan kesejahteraan penerima. Hal ini sejalan dengan temuan Solina et al. (2021) yang menegaskan bahwa dampak sosial ekonomi bantuan tunai sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan riil masyarakat. Evaluasi program tidak cukup hanya menilai jumlah penerima, tetapi juga harus mengkaji kualitas manfaat yang diterima.

Tantangan implementasi bantuan sosial juga berkaitan dengan keterbatasan integrasi program lintas sektor, khususnya antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Program bantuan yang tidak terhubung dengan upaya peningkatan keterampilan dan akses ekonomi berisiko menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Penelitian mengenai penguatan keterampilan penerima PKH di Tanjungpinang menunjukkan bahwa integrasi bantuan dengan pelatihan produktif mampu meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga penerima (Solina et al., 2022). Hal ini menegaskan pentingnya orientasi pembangunan sosial yang bersifat transformatif.

Dalam kelembagaan peran Dinas Sosial sebagai pelaksana utama bantuan sosial masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas pengawasan di lapangan. Tantangan ini semakin kompleks ketika berhadapan dengan kelompok rentan khusus seperti lansia terlantar, gelandangan, dan pengemis yang membutuhkan pendekatan sosial yang lebih spesifik. Studi Suryanti dan Incen (2023) serta Salsabila et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi sosial sangat dipengaruhi oleh intensitas pendampingan dan koordinasi antarunit kerja. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, program bantuan sosial sulit mencapai dampak jangka panjang.

Implikasi dari berbagai tantangan tersebut adalah perlunya pembaruan kebijakan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal Kota Tanjungpinang. Kebijakan tidak hanya harus responsif terhadap data kemiskinan, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi kunci untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas program (Mahadiansar & Romadhan, 2021). Upaya ini sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program kesejahteraan.

Tantangan implementasi bantuan sosial juga memberikan pelajaran penting mengenai perlunya transparansi dan keterbukaan informasi publik. Akses masyarakat terhadap informasi penerima dan mekanisme pengaduan yang jelas dapat mengurangi potensi konflik sosial dan kecemburuan antarwarga. Penelitian Utari et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan labelisasi penerima PKH

berpengaruh terhadap persepsi dan relasi sosial di tingkat komunitas. Pengelolaan informasi bantuan sosial harus dilakukan secara hati-hati dan beretika.

Tantangan implementasi program bantuan sosial di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui distribusi bantuan semata. Diperlukan penguatan data, koordinasi kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta integrasi bantuan dengan program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Temuan-temuan penelitian terdahulu menegaskan bahwa keberhasilan bantuan sosial sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola tantangan tersebut secara berkelanjutan (Hakim et al., 2024; Siahaan et al., 2025). Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, program bantuan sosial berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Program bantuan sosial pemerintah di Kota Tanjungpinang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap pemulihian ekonomi lokal. Implementasi program seperti PKH, BLT, dan BPNT terbukti mampu mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga, meningkatkan kualitas hidup penerima, dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dampaknya masih lebih kuat pada perlindungan jangka pendek. Namun efektivitas program bantuan sosial tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait ketepatan sasaran akibat keterbatasan validitas data, kesenjangan distribusi antarwilayah, kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya integrasi bantuan dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Tanjungpinang menuntut penguatan sistem pendataan yang akurat, koordinasi lintas sektor yang solid, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta perumusan kebijakan bantuan sosial yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada dampak jangka panjang, sehingga bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antara. (2025). “Minister seeks public input to verify social aid data”, tersedia di [https://en.antaranews.com/news/393517/minister-seeks-public-input-to-verify-social-aid-data?utm\\_source=chatgpt.com](https://en.antaranews.com/news/393517/minister-seeks-public-input-to-verify-social-aid-data?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 16 Desember 2025.
- Antaranews. (2023). “Penduduk miskin ekstrem di Tanjungpinang turun signifikan”, tersedia di <https://kalbar.antaranews.com/berita/553224/penduduk-miskin-ekstrem-di-tanjungpinang-turun-signifikan>, diakses pada 16 Desember 2025.
- Antaranews. (2025). “Indonesia tightens social aid rules, targets eligible recipients”, tersedia di [https://en.antaranews.com/news/373357/indonesia-tightens-social-aid-rules-targets-eligible-recipients?utm\\_source=chatgpt.com](https://en.antaranews.com/news/373357/indonesia-tightens-social-aid-rules-targets-eligible-recipients?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 16 Desember 2025.
- Bintania, A. (2020). Karakteristik Kebutuhan Mustahiq dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat oleh Baznas Kota Tanjungpinang. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2, 35-52. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.68>.
- BPS. (2022). “Poverty Profile of Tanjungpinang Municipality 2022”, tersedia di [https://tanjungpinangkota.bps.go.id/en/pressrelease/2022/12/15/317/poverty-profile-of-tanjungpinang-municipality-2022.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://tanjungpinangkota.bps.go.id/en/pressrelease/2022/12/15/317/poverty-profile-of-tanjungpinang-municipality-2022.html?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 16 Desember 2025.
- Hakim, A., Badjo, A., Wibowo, A. H. M., Afin, A. S., Ricnaldi, R., Putra, R. R., & Afriyadi, A. (2024). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di kota Tanjungpinang. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1033-1042. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6951>.
- Hardiansyah, R., Saputra, E. K., Armansyah, A., & Putri, D. M. (2022). Kajian Pemulihan Ekonomi Daerah dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang Tahun 2021. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(4), 152 9-1536. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.868>.

- Khairunisa Dwita, Isti (2021) Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dimasa Pandemi Pada Smk Negeri 5 Tanjungpinang. *Skripsi*, STIE Pembangunan Tanjungpinang.
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., Putri, R. A., & Azizi, O. R. (2022). Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 45-55. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.37594>.
- Mahadiansar, M., & Romadhan, F. (2021). Strategi Partisipatif Pembangunan Sosial di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(1), 43-55. <https://doi.org/10.33701/cc.v1i1.1626>.
- Mailani, E., & Novita Indah Hasibuan, Y. H. (2018). Analisis Deskriptif Pengembangan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) Simpang Tiga di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(3), 808-817.
- Mukhlis, S., & Siam, N. U. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Pada Kelurahan Tanjung Unggat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 445-460. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v2i2.43>.
- Pramesti, R., Muhammad, A. S., & Safitri, D. P. (2019). Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 81-93. <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34583>.
- Presmedia. (2025). "Pemko Tanjungpinang Bagikan 1.463 Kartu Penerima Bansos PKH dan BPNT", tersedia di <https://presmedia.id/pemko-tanjungpinang-bagikan-1-463-kartu-penerima-bansos-pkh-dan-bpnt/>, diakses pada 16 Desember 2025.
- Putri, R. D., Simbolon, L. O. B., Nabilah, N., Wandarizqa, N., & Pangestoe, W. (2025). Analisis Dampak Revitalisasi Infrastruktur Publik dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui UMKM Kawasan Kota Lama Tanjungpinang. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 244-250. <https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3376>.
- Ramadhani, N. A., Manurung, S. B., & Halawa, E. C. (2024). Evaluasi Kebijakan Program Perumahan Bersubsidi Di Kota Tanjungpinang: Analisis Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 670-685. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i4.3942>.
- Republika. (2025). "Penyaluran Bansos PKH dan Sembako di Tanjungpinang Capai 99 Persen", tersedia di [https://news.republika.co.id/berita/st5rwc451/penyaluran-bansos-pkh-dan-sembako-di-tanjungpinang-capai-99-persen?utm\\_source=chatgpt.com](https://news.republika.co.id/berita/st5rwc451/penyaluran-bansos-pkh-dan-sembako-di-tanjungpinang-capai-99-persen?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 16 Desember 2025.
- Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Geladangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3), 132-141. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>.
- Siahaan, S. T., Siregar, A. C., Aryanisah, B., & Pangestoe, W. (2025). Relevansi dan Tantangan Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Mendorong Pemulihian Ekonomi Lokal di Kota Tanjungpinang. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 365-370. <https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3454>.
- Solina, E., Aspariyana, A., & Mahadiansar, M. (2021). Dampak sosial ekonomi masyarakat penerima bantuan langsung tunai masa Pandemi COVID-19 di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Neo Societal*; Vol, 6(2). <https://doi.org/10.52423/jns.v6i2.17154>.
- Solina, E., Syafiti, R., Elsara, M., Rahmawati, N., & Ihsan, M. (2022). Peningkatan Keterampilan Kerajinan Tangan pada Ibu-Ibu Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kampung Bulang Kota Tanjungpinang: Improving Handicraft Skills for Recipients of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Kampung Bulang Kota Tanjungpinang. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 85-96. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1309>.
- Suprihartini, L., & Kurniawan, R. (2019). Peran Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Koperasi Nelayan Kota Tanjungpinang. *Bahtera Inovasi*, 2(2), 94-101. <https://doi.org/10.31629/bi.v2i2.2532>.
- Suryanti, U. M., & Incen, M. (2023). Peran dinas sosial dalam peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di Kota Tanjungpinang. *Journal of Religion and Social Transformation*, 1(2), 46-58. <https://doi.org/10.24235/b7zs0q18>.
- Utari, D. S., Rinah, S. A., Sigalingging, D. N., & Dwiniati, D. (2024). Dampak Kebijakan Labelisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Manfaat Bantuan PKH di Kecamatan

- Tanjungpinang Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 211-224.  
<https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.163>.
- Yusnike, Y., & Natalia, J. (2024). Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 318-324.  
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.915>.
- Zurina, Z., Kustiawan, K., & Adiputra, Y. S. (2022). Evaluasi Program E-Warong Kube-Pkh Di Kota Tanjungpinang Tahun 2020. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 271-280.